

MEMPERTIMBANGKAN FENOMENA POPULISME ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERTARUNGAN DISKURSIF: KONTESTASI WACANA POLITIK ANTARA GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA (GNPF-ULAMA) DAN NAHDLATUL ULAMA (NU)

Dian Dwi Jayanto

Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM

Email: dwijayanto_dian@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa GNPF-Ulama bukan menjadi kekuatan tunggal dalam mewakili aspirasi politik umat Muslim di Indonesia hari ini, sebagaimana unit analisis mainstream ketika mendiskusikan fenomena populisme Islam di Indonesia. Terdapat Nahdlatul Ulama (NU) yang memainkan peran penting dalam upaya menantang dan bahkan ingin merebut kembali wacana populisme Islam dari GNPF-Ulama. Upaya NU untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan politik Islam tidak lepas dari kebangkitan gerakan Bela Islam yang telah mereduksi pengaruh NU sebagai organisasi Islam yang dominan di Indonesia. Seturut dengan hal tersebut, analisis wacana dalam rangka memobilisasi kesadaran umat Islam di Indonesia guna mendapatkan legitimasi penting untuk dikemukakan, baik sebagai kerangka teori maupun metodologi, selain kajian tentang populisme dan populisme Islam. Di sisi lain, populisme berbasis identitas keagamaan Islam kerap dipahami sebagai salah satu model populisme yang berlawanan dengan kekuatan populisme berbasis nasionalisme. Padahal, upaya menyatukan ide nasionalisme dan Islam telah menjadi narasi agenda populisme bagi NU guna melawan narasi wacana GNPF-Ulama. Terlepas dari perbedaan ideologi keagamaan, perbincangan tentang populisme Islam di Indonesia tidak terlepas dari persoalan pertarungan wacana yang terjadi di dalam internal kekuatan kelompok Islam itu sendiri. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan sebuah pembacaan terhadap fenomena populisme di Indonesia dalam prespektif diskursif.

Kata Kunci: *Populisme Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Nahdlatul Ulama.*

Abstract

This study argues that National Movement of Fatwa Guards-Ulama (GNPF-Ulama) is not the sole political representation of Indonesian Muslim power at the moment, as the main analysis unit when discussing the phenomena of Islamic populism in Indonesia. Nahdlatul Ulama strives to retrieve discourse of Indonesian Islamic populism from GNPF-Ulama. NU's efforts to reinforce its position as an Islamic political power are triggered by evaluation that the resurgence of earlier populis movement has affected NU's influence as the dominant organization in Indonesia. In line with this argument, discourse analysis on the importance of Indonesian Muslims mobilization for political purposes can be applied both as a theoretical and ideological framework, in addition to the study of populism and Islamic populism. On the other hand, Islamic identity based populism can be understood as one of the models which in contrast with populism based on nationalism. Conversely, the effort to unite nationalism and Islam has become Nu's agenda to revoke GNPF-Ulama's popuslis narrative. In spite of differences in religious ideology, the discussion of Islamic populism is arising out of the narrative contestation occurring within the internal Muslims itself. Finally, this study offers a reading of the phenomena of Islamic populism in the context of discourse.

Keywords: *Islamic Populism, Discourse, National Movement of Fatwa Guards-Ulama, Nahdlatul Ulama.*

PENDAHULUAN

Populisme Islam menjadi suatu topik yang belakangan sangat marak diperbincangkan terkait dinamika politik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari serentetan peristiwa demonstrasi "Bela Islam" yang dimotori GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 di Jakarta yang berhasil menghimpun umat Islam untuk melakukan protes terhadap penodaan agama yang dilakukan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Organisasi dan gerakan GNPF-MUI ini berawal dari upaya

menegakkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta sekaligus kandidat *incumbent* dalam kontestasi berikutnya, telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran. Gerakan yang dipelopori oleh berbagai Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI), ini menuntut Ahok untuk mundur dari jabatan gubernur dan segera diadili. Pada fase-fase berikutnya, tepatnya semenjak Oktober 2017, berubah menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Pada perkembangannya, GNPF-MUI berubah menjadi GNPF-Ulama (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama). Mereka terus melebarkan pengaruhnya atas percaturan politik di Indonesia, terlepas dari hasil yang dicapai. Misalnya, keterlibatan mereka menerbitkan fatwa menjelang Pilkada serentak pada tahun 2018, menyelenggarakan Ijtima Ulama untuk memberikan rekomendasi nama calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto, hingga secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mereka tak lupa juga menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk mendukung pasangan yang telah didukung ulama tersebut.

GNPF-Ulama (sebelumnya GNPF-MUI) menekankan bahwa aspirasi mereka adalah representasi dari Islam dan umat Islam di Indonesia. Narasi wacana yang kerap terbentuk adalah membingkai sumber daya populisme dengan kesatuan identitas sesama umat Islam. Di sisi lain, upaya GNPF-Ulama untuk meneguhkan identitas sebagai representatif umat Islam mendapatkan tantangan dari organisasi terbesar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Upaya-upaya NU semenjak bergulir rencana aksi Bela Islam telah menunjukkan bagaimana mereka berusaha mereduksi kekuatan populisme Islam versi GNPF-Ulama. Paling tidak dibuktikan dengan surat resmi organisasi yang melarang umat Islam, khususnya warga NU, untuk mengikuti Aksi Bela Islam di Jakarta. Sejak jauh hari sebelumnya, NU telah mengkampanyekan konsep “Islam

Nusantara” yang dapat mengesankan bahwa mereka adalah manifestasi dari Islam di Indonesia. Selain itu, jika GNPF-Ulama hanya menekankan aspek wacana keagamaan dalam membentuk legitimasi populisme Islam, NU menggunakan dua wacana sekaligus, yakni dimensi keagamaan dan nasionalisme.

Berbicara populisme Islam di Indonesia, mungkin tidak ada peneliti yang melampaui Vedi Hadiz dalam memberikan perhatian. Sehingga, kajian-kajian Hadiz harus mendapatkan porsi yang sesuai dalam *literature review* ini.

Bagi Hadiz, fenomena maraknya kemunculan populisme Islam tidak terlepas dari rasa geram berkepanjangan atas janji-janji pembangunan dan kesejahteraan kapitalisme global yang tak kunjung terwujud. Populisme Islam, meringkai suatu gerakan dengan berbasis identitas kesamaan agama (umat Islam), adalah manifestasi protes sekaligus menjadi semacam alternatif untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan ekonomi yang terus-menerus berlangsung dengan berusaha merebut sumber daya dan kekuasaan di negara (Hadiz, 2014, 2016). Penjelasan itu masih tetap mewarnai analisis Hadiz ketika berbicara tentang fenomena Bela Islam. Sikap protes terhadap Ahok berkorelasi positif dengan ekspresi solidaritas umat Islam dan kemarahan atas kondisi keterpurukan sosial-ekonomi yang menjadi saluran terwujudnya *marketing moral*, “sebuah ruang yang mempertemukan simbol Islam yang terus menerus dikonsumsi dan diproduksi sebagai ekspresi kemarahan terhadap ketidakadilan *status quo* yang berlangsung” (Hadiz & Rakhmani, 2017).

Hadiz (2016) juga menyatakan perbedaan bentuk dari tipe populisme Islam klasik dan yang terjadi belakangan ini. Jika pada masa-masa sebelumnya sumber daya populisme Islam dipergunakan untuk melawan kekuasaan kolonialisme dan menawarkan bentuk negara syariat, melalui gerakan Pan-Islamisme misalnya, namun sekarang lebih pada bagaimana menciptakan narasi identitas yang berbasis pada umat Islam yang terpinggirkan dari rezim politik hari ini. Populisme Islam di sini dipergunakan sebagai lintasan dalam bergulat mendapatkan

kekuasaan dan sumber daya di skala nasional. Entah melalui partai politik, organisasi keagamaan hingga pada bentuk ekstrem berupa terorisme yang pada gilirannya menjadikan populisme Islam sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya.

Hadiz dan Robinson (2017) juga menilai pertarungan model populisme yang terjadi di Indonesia berlangsung antara populisme berorientasi nasionalis dan Islam. Tentu hal ini tidak lepas dari akar kesejarahan dari kekuatan dominan di Indonesia yang masih tetap tersisa. Sebab, baik kekuatan kiri maupun liberal telah tersingkir dari panggung politik dan tidak bisa mengalahkan kedigdayaan oligarki yang masih tetap berjalan pasca reformasi. Kontestasi dari bentuk populisme tersebut masih tetap tidak jauh dari kepentingan masing-masing oligarki untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan mereka.

Contoh lain kajian yang membahas populisme Islam di Indonesia adalah tulisan Savitri & Andriyanti (2018). Mereka beragumen hampir sama dengan Hadiz tentang kompetisi antara populisme Islam melawan kelompok nasionalisme yang pada dasarnya sama-sama berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di Indonesia. Mereka menambahkan analisisnya dengan menyertakan diskusi kembalinya ideologi dan praktek fasisme baru untuk kepentingan akumulasi modal.

Dari berbagai yang uraian di atas, bagi Hadiz dan rekan-rekannya, populisme Islam di Indonesia tidak lepas dari dampak ketimpangan struktur ekonomi kapital, peran oligarki mengambil kesempatan untuk menggunakan identitas “umat” untuk mencapai kepentingannya, dan akhirnya fenomena populisme Islam tidak jauh dari hanya sekedar bentuk baru dari cara yang digunakan kelompok oligarki atau elit ekonomi politik mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di dalam negara.

Pendekatan Hadiz yang cenderung bercorak Marxian dengan basis analisis struktur dan basis material memang bisa memberikan penjelasan yang cukup memuaskan. Namun, karena pendekatan ini berada pada level makro yang menempatkan

populisme Islam terintegrasi dalam analisis struktural. Dampaknya, akan cenderung menggeneralisir suatu fenomena dan mengkaburkan hal-hal yang bersifat partikular. Taruhlah ketika berbicara tentang representasi dari populisme Islam di Indonesia, sering hanya menunjuk GNPF-Ulama, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) atau lebih spesifik lagi kelompok semacam FPI, yang memang kerap menonjol tampil di permukaan. Padahal, di dalam Islam di Indonesia, terdapat fragmentasi yang luar biasa dalam upaya berebut pengaruh umat Islam.

Beranjak dari kajian-kajian terdahulu yang dikemukakan, penulis menawarkan gagasan untuk menganalisis fenomena populisme Islam dalam perspektif analisis pertarungan wacana. Memang, kajian tentang analisis wacana seputar aksi Bela Islam telah banyak dilakukan, seperti melihat bagaimana strategi pembingkai wacana dalam memobilisasi umat Islam agar menghadiri demonstrasi tersebut (misalnya penelitian Pamungkas & Octaviani, 2017). Namun, belum ada yang menyentuh bagaimana kontestasi wacana antar kelompok Islam, dalam hal ini GNPF-Ulama atau PA 212 dan NU, dalam rangka berebut wacana untuk menegaskan kelompoknya sebagai representasi umat Islam atau populisme Islam. Ringkasnya, untuk menambah perspektif kita dalam melihat fenomena populisme Islam di satu sisi, dan analisis wacana di sisi yang lain, sekaligus memperjelas posisi tulisan ini, penulis menawarkan untuk mempertimbangkan pembacaan fenomena populisme Islam di Indonesia dalam sudut pandang kontestasi wacana politik dua kelompok Islam yang telah, sedang dan akan terus berlangsung, yakni GNPF-Ulama dan NU. Tujuannya adalah memberikan gambaran bagaimana deskripsi kontestasi wacana populisme Islam ini berlangsung.

Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara singkat keterkaitan analisis wacana dan populisme Islam.

ANALISIS WACANA DAN PEMBELAHAN POPULISME ISLAM

Berbicara wacana atau diskursus, kita tidak bisa terlepas dari nama besar Michael Foucault yang terkait dengan pengetahuan. Bagi Foucault, sebagaimana dikutip Jager, suatu pengetahuan merupakan sebuah fenomena diskursif. Ketika seseorang menyatakan atau menceritakan suatu realitas tertentu, maka dia sedang melakukan interpretasi makna dan rekonstruksi ulang terhadap suatu realitas atau pengetahuan. Analisis wacana bekerja sebagai upaya mengidentifikasi pengetahuan tersebut sebagai suatu diskursus untuk memahami konteks pengetahuan atau kekuasaan yang menjadi objek kritiknya (Jager, 2001: 33). Lebih lanjut Jager juga menjelaskan bahwa analisis wacana tidak fokus pada apakah suatu wacana itu telah mereduksi pandangan terhadap realitas tertentu, atau apakah interpretasi terhadap realitas itu benar-benar nyata, namun lebih melihat bagaimana suatu realitas itu diproduksi dan dibenarkan banyak orang.

Secara garis besar, Wodak (2001: 1) menyatakan bahwa analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) adalah “language as social practice and takes consideration of the context of language use to be crucial” (Wodak, 2001: 1). Suatu ungkapan teks bahasa, baik melalui tulisan maupun ucapan, harus dipahami dalam konteks komunikasi yang berusaha untuk membentuk suatu praktek di dalam kehidupan sosial. Gambangnya, analisis wacana berupaya untuk membongkar relasi antara pernyataan atau teks dalam relasi bahasa dan kekuasaan.

Apakah setiap pernyataan itu selalu dapat dikategorikan sebagai wacana? Tidak! Suatu pernyataan atau teks tidak secara otomatis menjadi wacana, kecuali pernyataan itu memiliki bobot pengaruh terhadap kehidupan sosial. Beda cerita ketika suatu pernyataan itu pada dasarnya yang memproduksi adalah orang yang sudah memegang kekuasaan di dalam struktur sosial, maka secara otomatis pernyataan tersebut pasti menjadi suatu wacana (Ibid: 10). Poin terakhir yang penulis sebut penting untuk dikemukakan. Sebab, diskursus tidak terlepas dari suatu bentuk

relasi kuasa yang sedang berlangsung dalam kehidupan sosial. Sehingga, ketika seseorang yang kebetulan memiliki kekuasaan, maka di situ wacana itu bekerja. Karakter kekuasaan dan pengaruh yang melekat di dalam pernyataan ini menjadi tolak ukur penting sesuatu dianggap sebagai wacana atau tidak. Sebagaimana dijelaskan Mills (2007: 7), definisi umum yang paling banyak dipakai tentang pengertian wacana adalah seluruh pernyataan dalam bentuk tulisan maupun ucapan yang harus memiliki makna serta “pengaruh” di dalam kehidupan nyata.

Dalam rangka menciptakan suatu wacana, kekuasaan tidaklah bersifat tunggal, namun terdapat kekuasaan lain yang turut berebut menguasai wacana tertentu. Wacana adalah hasil dari ekspresi dan manipulasi kekuasaan yang berbeda-beda di dalam struktur sosial (Wodak, 2001: 11). Penjelasan Bayat (2010), terutama terkait dengan kontestasi wacana dari kekuasaan yang berbeda dalam dinamika politik Islam, akan sangat membantu kita memahami tentang hal ini. Ia menyatakan, kata-kata tidak secara otomatis memiliki kekuasaan, namun kekuasaan dan pengaruh dari kata-kata berasal dari siapa yang mengucapkan. Selanjutnya, banyak orang yang menerima itu sebagai kebenaran dan disinilah wacana atas kata-kata itu bekerja. Bayat juga mengatakan ini adalah penjelasan untuk menjembatani teori dan praktek gerakan sosial serta keterkaitan pernyataan dan wacana.

Seperti yang disinggung sebelumnya, Bayat juga menambah penjelasan Foucault yang meyakini kata-kata otomatis memiliki kekuasaan. Kata-kata adalah instrumen dari pergulatan berbagai kekuasaan tokoh yang sebelumnya sudah memiliki pengaruh, baik terhadap komunitas mereka sendiri maupun orang secara luas. Bayat mencontohkan diskursus tentang salah satu topik politik Islam yang senantiasa tidak habis diperdebatkan, apakah Islam setuju dengan demokrasi atau tidak? Penjelasan ini tidak akan mendapatkan analisis yang memuaskan ketika kita hanya mencari-cari jawaban dari segi teologis, entah dari Quran maupun Hadist, yang berbicara demokrasi. Tapi, ini soal kemampuan dan kapasitas seseorang dalam melakukan internalisasi suatu

intepretasi teologis atas demokrasi bagi kelompoknya dan umat Islam secara luas. Baik yang menyatakan “Islam sesuai dengan demokrasi” atau yang “Islam mengharamkan praktek demokrasi” pada dasarnya dua pernyataan itu adalah pertarungan wacana tafsir atas ajaran Islam. Tolak ukur menilai mana pernyataan yang paling berpengaruh dan hegemonik membangun kesadaran umat Islam, itulah kemenangan suatu wacana.

Apakah benar ada penistaan agama yang dilakukan Ahok? Apakah bendera yang dibakar Banser adalah panji Nabi Muhammad atau bendera HTI? Siapakah yang paling paling sah mengatasnamakan ulama dengan mendukung kandidat Capres tertentu, kelompok Ijtima Ulama yang mendukung Prabowo atau kiai pesantren yang dihimpun Ma’ruf Amin mendukung Jokowi? Secara keseluruhan tidak penting untuk menengok kebenaran berdasarkan dalil agama, tapi lebih melihat wacana mana yang paling berpengaruh, pernyataan siapa dan apa yang paling berdampak dalam praktek sosial. Inilah kajian wacana, atau spesifik lagi kajian perebutan kuasa wacana.

Bagaimana keterkaitan pembelahan wacana dalam populisme Islam? Berkaitan dengan populisme, kita akan akrab dengan istilah “*the people*” melawan “*The elit*”. Kajian tentang populisme beranjak pada persoalan bagaimana sebuah gerakan secara kolektif menghimpun masyarakat atau rakyat, serta melakukan pengorganisasi atas nama “rakyat” (*the people*) kebanyakan untuk melawan dominasi elit (*the elit*), baik pejabat publik, atau elit politik. Karakter kunci dari populisme adalah konfrontasi yang terjadi dimana gerakan tersebut mengklaim menjadi perwakilan yang sah atas sumber daya kekuasaan “*the people*”, yang memiliki keinginan dan harapan, yang disepelihkan atau tidak digubris oleh elit politik (Canovan, 2006: 242).

Terkait dengan istilah Islam yang diletakkan setelah populisme, penulis sepakat dengan penjelasan Hadiz (2016) yang mengatakan bahwa populisme Islam adalah salah satu bentuk dari populisme secara umum. Bagi Hadiz, suatu populisme harus menghimpun berbagai lapisan kelas di dalam struktur gerakan,

baik dari kelompok atas atau borjuis, kelas menengah hingga kelompok miskin. Ringkasnya, populisme adalah gerakan yang lintas kelas yang asimetris. Ketika populisme Islam yang berlangsung, maka sumber daya pembingkai identitas agama yang akan dipergunakan. Sehingga, "*the people*" yang sebelumnya dipahami sebagai rakyat, warga negara dan seterusnya diganti dengan umat Islam. Akhirnya, suatu gerakan populisme Islam harus mengklaim diri sebagai perwakilan Islam dan umat Islam untuk bisa menggalang solidaritas berbasis simbol keagamaan. Dalam kasus gerakan Bela Islam misalnya GNPF-Ulama menggunakan sentimen berbasis keumatan sebagai pengganti "*the people*" yang berusaha mengkritik penguasa atau rezim hari ini (*the elit*). Apa yang dilakukan oleh GNPF-Ulama memenuhi kriteria ketika mereka disebut sebagai populisme Islam.

Namun, pada saat bersamaan, representasi sebagai perwakilan memperjuangkan Islam dan umat Islam mendapatkan tantangan serius. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar dan berpengaruh di Indonesia berusaha menghadang pengaruh kuat dari GNPF-Ulama. Dengan konsep "Islam Nusantara", kita bisa membaca sebuah upaya eksklusifitas NU sebagai representasi Islam di Indonesia. Sekaligus, menegaskan bahwa apa yang disuarakan NU pada dasarnya adalah suara Islam Indonesia dan suara umat Islam Indonesia. Perbedaannya, jika GNPF-Ulama hanya menonjolkan sentimen berbasis keagamaan dengan ciri keumatan semata, NU melakukan dua narasi wacana yang bersamaan, yakni berbasis keumatan dan kebangsaan (nasionalisme). NU berusaha melakukan sebuah wacana tandingan untuk merebut kembali dominasi GNPF-Ulama sebagai representasi umat Islam di Indonesia (*the people*).

Berkaitan dengan perebutan kuasa wacana yang telah dikupas sebelumnya, penulis meletakkan bahwa baik GNPF-Ulama maupun NU sedang sama-sama berusaha melakukan pertarungan wacana untuk mencari legitimasi siapa yang sebenarnya mewakili *the people* atau umat Islam di Indonesia. Dari perspektif inilah kita bisa melihat bagaimana populisme Islam di

Indonesia dilihat sebagai sebuah fenomena pertarungan wacana antar kekuasaan yang berbeda.

Pada bagian selanjutnya penulis akan memberikan deskripsi tentang bagaimana kontestasi wacana populisme Islam berlangsung antara kelompok GNPf-Ulama dan NU. Khususnya seputar aksi Bela Islam dan Islam Nusantara.

KEMENANGAN GNPf-MUI SEBAGAI POPULISME ISLAM ATAS NU DALAM AKSI BELA ISLAM

Polemik penistaan agama dimulai ketika Buni Yani menyebarkan video yang kemudian viral melalui media sosial facebook miliknya. Dalam video itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang berpidato di Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016. Ahok sempat menyinggung surat al-Maidah ayat 51 yang sering digunakan lawan politiknya agar tidak memilih dirinya. Perlu diketahui Ahok adalah orang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen. Pernyataan Ahok “Dibohongi (pakai) al-Maidah ayat 51” menuai kecaman luas dari masyarakat Muslim. Meski Ahok sempat meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya tersebut, gelombang protes umat Islam terus berdatangan.

Merespon derasnya polemik tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, dengan melibatkan empat komisi MUI, menyatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dengan memosisikan al-Quran itu rendah dan sebagai alat kebohongan. Sontak, kelompok umat Islam yang sebelumnya sudah memprotes ucapan Ahok tersebut mendapatkan energi lebih. Berdirilah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang terdiri dari berbagai organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) dan lain-lain. Tujuannya adalah menegakkan fatwa MUI yang menyatakan Ahok menistakan agama. Perlu dicatat, meskipun ada embel-embel MUI dibelakang nama organisasi ini, namun Ma’ruf Amin, selaku Ketua MUI saat itu, menyatakan tidak ada hubungan yang bersifat struktural dengan MUI (Tempo.co, 31/01/2017).

Seperti diketahui, GNPF-MUI adalah organisasi yang berperan penting menjadi inisiator serentetan aksi Bela Islam yang menuntut Ahok untuk diadili.

Berikut rangkaian aksi demonstrasi umat Islam turun ke jalan tersebut: pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2016 yang dikomandani oleh Habib Rizieq Shihab selaku Imam Besar FPI di Balai Kota (dikenal dengan aksi 1410 dan Aksi Bela Islam I), Aksi Bela Islam II dilakukan pada tanggal 04 November 2016 di depan Istana Merdeka (dikenal dengan aksi 411), Aksi Bela Islam III dilakukan pada tanggal 02 Desember 2016 yang berpusat di Monas hingga Bundaran HI (dikenal dengan aksi 212). Pada aksi 212 ini, Presiden Joko Widodo turut menemui para pengunjung rasa dan sempat berpidato. Aksi ini merupakan paling besar dibanding aksi-aksi sebelumnya dari segi jumlah massa yang hadir. Terjadi perdebatan juga terkait jumlah demonstran yang hadir. Pihak penyelenggara, yakni GNPF-MUI mengklaim jumlah massa mencapai tujuh juta lebih. Sebagian yang lain mengatakan sekitar 500.000, 700.000 dan seterusnya.

Terlepas dari kalkulasi yang berbeda, poin penting disini adalah kapasitas GNPF-MUI dalam rangka membangun wacana tentang penistaan agama yang berhasil menarik banyak umat Islam untuk ikut serta turun jalan. GNPF-MUI memosisikan diri bukan sebagai kelompok Islam tertentu, tapi lebih luas untuk mbingkai diri sebagai representasi dari aspirasi Islam dan umat Islam di Indonesia. Pamungkas dan Oktaviani (2017) menjelaskan hal ini bahwa bagaimana kepiwaan menciptakan ruang publik muslim melalui propaganda media sosial sehingga Aksi Bela Islam adalah aksi Islam itu sendiri. Strategi ini bukan hanya via media sosial, tapi juga menyasar masyarakat *luring*, di luar jaringan internet, yang turut mendukung aksi bela Islam ini.

Di sisi lain, PBNU terutama melalui Ketua Umumnya Said Aqil Siradj menunjukkan kecenderungan kontra terhadap aksi Bela Islam. Sikap kontra tersebut ditandai dengan larangan tegas yang ia sampaikan, "Warga NU saya larang, Anshor saya larang, pemuda-pemuda NU, mahasiswa NU, PMII saya larang, enggak

akan ada yang turun," kata Said Aqil merespon rencana aksi demonstrasi atas penistaan agama Ahok yang dikutip CNN Indonesia (cnnindonesia, 14/10/2017). Lebih jauh Ketua Umum PBNU dua periode ini juga menyatakan bahwa telah terjadi penebaran fitnah yang berlebihan terhadap Ahok. Sikap tersebut sebagai wujud PBNU berusaha untuk menghindari fitnah yang lebih besar lagi dan mengancam stabilitas negara. Dalam banyak kesempatan yang lain, Said Aqil juga menyatakan bahwa aksi Bela Islam sangat rentan ditunggangi politik. Ia meragukan kadar ketulusan aksi tersebut semata-mata demi memperjuangkan kepentingan umat, namun lebih melihatnya sebagai suatu agenda politik. Dari segi waktu, memang saat itu sedang berlangsung kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dimana Ahok menjadi salah satu kandidat calon gubernur untuk periode kedua.

Bagi PBNU sendiri apakah Ahok menistakan agama atau tidak? Dalam wawancara di salah satu program *talkshow* Mata Najwa pada tanggal 02 November 2016, Said Aqil menyatakan dengan bersumpah Demi Allah yang patut dianggap sebagai penista agama adalah kelompok seperti ISIS yang sering melakukan pembunuhan dan gerakan terorisme yang pada gilirannya menghancurkan nama baik Islam. Ia lebih menyoroti bahwa pemaknaan penistaan agama adalah ketika kelompok tertentu mengatasnamakan Islam, tapi apa yang diperjuangkan berbeda dengan Islam, maka ia sedang menistakan Islam. Ketika Najwa Shihab selaku *host* acara tersebut bertanya apakah Ahok menistakan agama? Said Aqil cenderung tidak berkenan menjawab hal tersebut (dalam NU Online, 02/11/2018).

Dari beberapa pernyataan Ketum PBNU tersebut dapat ditarik beberapa hal terkait sikap NU secara struktural. Pertama, NU secara tegas bersikap kontra terhadap aksi Bela Islam yang digawangi GNPF-MUI. Sikap ini bukan hanya diucapkan oleh Said Aqil Siroj, tapi juga Ma'ruf Amin selaku Ketua Rais Suriah PBNU. Meski ketika itu kapasitasnya sebagai ketua MUI yang mengeluarkan fatwa penistaan agama Ahok, tapi belakangan ia

juga malah melarang seluruh umat Islam untuk tidak ikut aksi Bela Islam. Kedua, terdapat dukungan kuat terhadap Ahok sebagai korban fitnah dan politisasi agama. Ketiga, NU cenderung tidak mau bergulat pada wacana apakah Ahok menistakan agama atau tidak, namun ia melakukan pemingkiaan wacana yang lebih luas terhadap aksi tersebut. Terutama ketika NU berkali-kali menyatakan bahwa aksi Bela Islam tidak lebih dari kepentingan politik. Hal ini bisa dibaca sebagai upaya untuk mereduksi arus besar gerakan demonstrasi umat Islam di Jakarta.

Bentuk sikap kontra terhadap aksi Bela Islam dari NU juga nampak ketika terjadi perdebatan seru terkait hukum melaksanakan salat Jumat di tempat terbuka menjelang aksi Bela Islam pada hari Jumat, 02 Desember 2016. Said Aqil Siroj menyatakan, berdasarkan dari hasil lembaga Batsul Masail PBNU, bahwa menurut mazhab Imam Syafii dan Maliki, GNPF-MUI beserta seluruh partisipan aksi Bela Islam 212 ketika menunaikan Salat Jumat di lapangan hukumnya tidak sah. Tentu hal ini bisa dikaitkan dengan upaya penggemosan aksi Bela Islam yang akan dilakukan di hari Jumat. Sebab, salah rangkaian acaranya adalah melakukan Salat Jumat bersama-sama di sekitar Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Merespon fatwa dari PBNU, Habib Rizieq Sihab sebagai aktor utama GNPF-Ulama, sebagaimana berita yang dilansir oleh jawapos.com (28/11/2016) menyangkal pendapat tersebut. Dia mengatakan, salat Jumat di jalan protokol perkotaan atau pedesaan ber hukum sah dan tidak haram. Dia menyandarkan pendapatnya dengan merujuk Kitab *al-Majmu' Syarhul Muhadzab* Jus 4 halaman 51 karangan Imam Nawawi yang terkenal sebagai imam mazhab Syafii.

Baik Said Aqil Siroj maupun Habib Rizieq Shihab sama-sama menyandarkan pendapatnya terhadap pendapat mazhab Imam Syafii. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam analisis wacana terkait politik Islam tidak lagi penting meninjau kebenaran dari aspek teologis yang cenderung memiliki perbedaan interpretasi, namun lebih melihat narasi wacana siapa yang paling memiliki kekuatan menciptakan

kekuasaan hegemonik terhadap kelompoknya dan umat Islam secara umum. Artinya, tidak lagi penting membahas sah atau tidak hukum melaksanakan salat Jumat di tempat terbuka atau trotoar menurut pandangan mazhab Syafii, tapi melihat perkataan mana dari dua tokoh berpengaruh ini yang lebih dianggap sebagai kebenaran.

Dalam kasus pertentangan wacana seputar Bela Islam antara GNPF-MUI dan PBNU, penulis lebih melihat kemenangan narasi wacana dari GNPF-MUI. Hal ini paling tidak ditandai dengan membludaknya jumlah umat Islam yang hadir pada acara Bela Islam, terutama pada aksi 212. Sekali lagi, tentang jumlah demonstran yang hadir masih tetap menjadi perdebatan. Namun, kekuatan narasi sebagai perjuangan Islam dan aspirasi umat Islam begitu baik ditampilkan oleh GNPF-MUI dalam melakukan protes terhadap penistaan agama yang dilakukan Ahok. Meskipun dua organisasi Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah tidak mendukung secara langsung aksi ini, bahkan NU lebih bersikap kontra, namun nyatanya anggota dari dua organisasi ini yang paling banyak mendominasi massa umat Islam dalam Aksi Bela Islam. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Hadiz dan Rakhmani (2017) ketika melakukan survey terhadap 600 responden yang ikut aksi Bela Islam. Tidak seperti anggapan umum bahwa massa aksi Bela Islam terdiri dari HTI atau FPI, sebanyak 60% responden menyatakan bahwa mereka berafiliasi atau menjadi anggota dari NU atau Muhammadiyah.

Surutnya pengaruh NU dalam menghadapi gelombang besar Bela Islam juga terbukti dari perbedaan pandangan dari internal NU itu sendiri. Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI Jakarta sendiri bersikap berbeda dengan PBNU. Mereka bahkan mengerahkan seluruh pengurus dan anggota NU Jakarta untuk mengikuti aksi Bela Islam III. Hal ini semakin memperkuat lemahnya kapasitas PBNU dalam membangun suatu wacana, baik Bela Islam sebagai aksi politik atau Salat Jumat di lapangan tidak sah bahkan bagi internal organisasi mereka sendiri. Di sisi lain, keberhasilan memobilisasi massa umat Islam dan bahkan berhasil

menyingkap sekat antar berbagai kelompok Islam di Indonesia untuk bersatu menggalang kekuatan, GNPF-MUI menunjukkan kehebatan mereka melakukan kontruksi wacana yang juga turut berpenetrasi terhadap saingan mereka sendiri, yakni NU.

Penulis harus buru-buru menyatakan sebelum muncul protes dari pembaca terkait realitas di dalam tubuh NU itu sendiri. Terutama ketika penulis berani mengatakan bahwa NU melemah. Meskipun NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia, dalam perjalanannya, terdapat begitu banyak kekuatan di dalam tubuh NU itu sendiri. Lazim diketahui, kekuatan NU bukan terletak pada basis struktural, namun pada kultural. Setiap kiai lokal memiliki otoritas dominan yang bisa terlepas dari NU struktural. Hal ini tidak lepas dari faktor kesejarahan bahwa loyalitas jamaah sudah terbentuk terhadap kiainya lokalnya masing-masing sebelum NU berdiri. Sehingga, sering terjadi perbedaan pandangan dari NU struktural di pusat dengan sikap di daerah, atau perbedaan NU secara struktural dengan NU sebagai basis kultural. Penjelasan lebih lengkap terkait hal ini dapat dibaca di buku Endang Turmudi berjudul "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan" (2004).

Dengan demikian, penulis hendak menyatakan bahwa tereduksinya peran NU bukan dalam arti basis kultural di dalam realitas keagamaan di Indonesia, tapi melemahnya peran NU secara struktural, lebih spesifik lagi dalam taraf struktural NU di pusat. Sebenarnya terkait melemahnya peran NU dalam domain sosial politik sudah ditengarahi banyak pihak. Bahkan Greg Fealy & Robin Bush (2014) berdasarkan survey Asia Foundation juga mengkonfirmasi melemahnya NU juga terjadi bagi kiai-kiai NU itu sendiri dalam domain sosial dan politik. Fealy dan Bush menyatakan terjadi kemunduruan drastis peran sentral kiai-kiai NU, maupun Muhammadiyah, dalam mempengaruhi pilihan politik umat Islam di Indonesia. Meskipun dalam dimensi keagamaan, pendapat mereka masih sering di dengar umat Islam terutama di wilayah Jawa, namun dalam pengaruh sosial dan politik cenderung mengalami kemrosotan. Peran politik para pemuka agama NU dan Muhammadiyah di daerah pun tidak

bersifat secara langsung, namun hanya menjadi *broker* atau penghubung antar kepentingan politik.

Menyetujui apa yang dijelaskan Fealy dan Bush, kehadiran arus kuat dari GNPF-MUI menambah besar melemahnya peran NU sebagai pemegang kontrol dominasi terhadap kalangan NU sendiri, maupun umat Islam secara luas di Indonesia. GNPF-MUI berhasil melakukan penggalangan massa yang turut menyeret kader-kader NU menunjukkan kuatnya peran suatu isu atau wacana yang terbangun, bukan hanya sekedar kekuatan sosok yang mengeluarkan pernyataan. Alhasil, keberhasilan strategi GNPF-MUI menjadi representasi dari gerakan Islam itu sendiri aspirasi umat Islam meneguhkan mereka menjadi saluran aspirasi *the people* (umat Islam) dalam topik populisme Islam. Selanjutnya meletakkan baik Ahok sebagai dalang utama penistaan dan bahkan melebar ke Jokowi sebagai *the elit* yang harus dilawan. Dalam kasus ini, meskipun ada pertarungan wacana yang terjadi, GNPF-MUI keluar sebagai pemenang dari kontestasi populisme Islam, sekaligus melemahkan peran NU sebagai aspirasi organisasi Islam terbesar di Indonesia dari aspek pengaruh sosial dan politik.

ISLAM NUSANTARA SEBAGAI UPAYA NU MEMBANGUN WACANA REPRESENTASI POPULISME ISLAM DI INDONESIA

Konsep “Islam Nusantara” menjadi salah satu topik sentral yang belakangan menjadi jargon penting bagi NU. Islam Nusantara merupakan tema utama dalam Mukhtamar NU tahun 2015 di Jombang. Sontak konsep ini menuai banyak pro-kontra di komunitas muslim di Indonesia bahkan di luar negeri. Terkait dengan wacana dan populisme Islam dalam diskusi kita kali ini, penulis hendak meletakkan bahwa Islam Nusantara adalah suatu narasi wacana bagi NU dalam membangun pemahaman bahwa NU adalah representasi Islam di Indonesia dan wujud dari realitas keberagaman Islam di Indonesia atau Nusantara. Di tempat lain, penulis sudah menjelaskan beberapa poin terkait Islam Nusantara (Jayanto, 2018). Penulis akan mengemukakannya kembali dengan

lebih menitikberatkan Islam Nusantara dalam perspektif wacana dan populisme Islam.

Untuk mendefinisikan apa makhluk yang bernama Islam Nusantara tersebut, penulis akan lebih menyandarkan pengertian dari Rais Suriah PBNU yang termaktub dalam “Lampiran Khittah Islam Nusantara” yang dideklarasikan pasca Mukhtamar NU di Jombang. Ma’ruf Amin menyatakan, meskipun Islam Nusantara terkesan baru dideklarasikan, sebenarnya ia bukanlah hal yang sama sekali baru. “Namun, sebagai pemikiran, gerakan, dan tindakan, Islam Nusantara bukanlah hal yang baru. Islam Nusantara adalah adalah Islam *Ahlussunah Waljamaah al-Nahdliyah*”. Penjelasan singkat ini cukup memberikan gambaran terhadap kita tentang makna yang dikehendaki dari NU sendiri terkait Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara adalah baju baru bagi paham Islam NU itu sendiri. Atau, Islam Nusantara adalah NU, dan NU adalah Islam Nusantara.

Islam Nusantara sering digambarkan tidak jauh dari karakter dan prinsip-prinsip agama yang selama ini dipegang NU, seperti tengah-tengah (*tawasuth*), seimbang (*tawazun*), tegak lurus (*I’tidal*) dan seterusnya. Atau pemahaman paling umum dari Islam Nusantara adalah Islam yang sudah mengalami dialog antara agama dengan ekspresi kultural antropologis masyarakat nusantara. Hal ini mengingatkan kita dengan jargon “Pribumisasi Islam” yang pernah dipopulerkan Gus Dur.

Ketika Islam Nusantara dipahami sebagai bentuk beragama dan identitas bagi kalangan NU (*Ahlussunah Waljamaah al-Nahdliyah*), persoalan kemudian muncul adalah dampak eksklusif bagi kelompok lain yang bukan masuk kategori Islam Nusantara. Taruhlah kita bisa perlakukan Islam Nusantara sebagai identitas yang mengakomodir seluruh praktek keagamaan di Nusantara, maka ada benarnya ketika ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara semata-mata sebagai pembekuan identitas bagi wujud Islam di Indonesia yang berbeda dengan Islam yang tidak mengalami dialog kebudayaan dengan unsur lokal, atau biasa disebut Islam Arab. Dalam lampiran Khittah itu juga dinyatakan

bahwa Islam Nusantara sebagai sebuah respon terhadap maraknya gerakan Islam global seperti ISIS yang mengatasnamakan Aswaja tapi jauh dari nilai Aswaja yang dianut NU. Pada akhirnya, konsep Islam Nusantara sebagai identitas bagi NU juga diberlakukan bagi Islam di Indonesia untuk menghadang penyebaran ekspresi Islam ala Arab di Indonesia yang digambarkan senantiasa berbenturan dengan kearifan di Indonesia.

Fachruddin (2015) mencoba mempertanyakan apakah Islam Nusantara sebagai deskripsi atau ideologi? Jika ia dipahami sebagai deskripsi, maka Islam Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kultur keagamaan yang berbeda-beda di Indonesia. Namun, ketika Islam Nusantara dipahami sebagai sebuah ideologi yang lekat pada NU, maka Islam Nusantara telah membeku karena telah mengalami perjumpaan bagaimana bentuk esensi dari *Islam Nusantarawi*. Ketika Islam Nusantara dipahami sebagai ideologi, maka ia harus mengeluarkan kelompok lain dari peredaran Islam Nusantara.

Ada aspek lain yang penting untuk dikemukakan terkait Islam Nusantara kaitannya dengan aspek dialog agama dan kultur, yakni bagaimana Islam Nusantara tidak mengalami konfrontasi atas hubungan Islam dengan paham kebangsaan seperti nasionalisme selama tidak bertentangan dengan Islam. Ringkasnya, Islam Nusantara juga mengusung keterkaitan kuat antara Islam yang sesuai dengan paham kebangsaan atau nasionalisme.

Dari perspektif ini, kita bisa melihat bahwa Islam Nusantara adalah sebuah bentuk wacana yang dipergunakan NU dengan dua tema utama, yakni Islam dan nasionalisme. Salah satu ungkapan yang sering dikatakan adalah, Islam dan nasionalisme ibarat dua sisi mata koin yang tidak bisa dilepaskan. Ungkapan ini diyakini berasal dari KH Hasyim Asyari, pendiri dan Rais Akbar NU. Alhasil, Islam Nusantara adalah narasi besar NU dalam membentuk wacana sebagai ciri khas Islam di Indonesia yang mengusung Islam dan nasionalisme di Indonesia. Islam di Indonesia tidak hanya bisa diwujudkan dengan hanya

menonjolkan kesetiaan terhadap agama, tapi juga terhadap paham kebangsaan.

Keterpaduan nasionalisme dan Islam menjadi suatu agenda utama NU yang terus-menerus dikumandangkan baik secara internal maupun eksternal. Seperti kita ketahui, salah satu mars NU yang selalu dinyanyikan dalam setiap acara NU adalah "Syubbanul Wathon" atau Cinta Tanah Air yang diciptakan oleh Kiai Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU. Tidak hanya berhenti di lingkup internal, mereka juga sering mengkampanyekan bahwa Islam tidak bertentangan dengan nasionalisme, atau nasionalisme memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran Islam. Ditambah lagi, ketika hanya menonjolkan identitas keagamaan, maka yang terjadi di Indonesia seperti Suriah yang akan porak-poranda akibat peperangan karena tidak ada cinta terhadap bangsa.

Dengan demikian, melalui Islam Nusantara, NU hendak berusaha membangun identitas Islam di Indonesia yang harus berbasis nilai kearifan budaya lokal nusantara dan nasionalisme atau kebangsaan. Loyalitas terhadap agama harus bersamaan dengan loyalitas terhadap nasionalisme untuk menjaga keutuhan bangsa. NU berusaha untuk membangun sebuah basis legitimasi bagi umat Islam di Indonesia agar mengikuti ajaran Islam Nusantara, yang sebenarnya adalah ajaran NU itu sendiri, guna menjadi sebuah representatif bagi Islam dan umat Islam di Indonesia. NU berusaha untuk tetap memegang peran sosial dan politik sebagai perwakilan *the people*, dalam hal ini adalah umat Islam di Indonesia sebagai basis bentuk populisme Islam. Sedangkan yang hendak dilawan bukan *the elit* sebagaimana rezim politik di Indonesia hari ini, tapi gerakan Islam global yang dianggap mereka sudah begitu buas di Indonesia.

Tak ayal, Islam Nusantara menuai banyak protes dari kalangan umat Islam Indonesia, tidak terkecuali dari tokoh yang berafiliasi dengan GNPF-Ulama. Habib Rizieq Shihab selaku Imam Besar FPI dan juga sosok penting GNPF-Ulama mengemukakan keras konsep Islam Nusantara. Habib Rizieq secara tegas menyatakan

bahwa ajaran Islam Nusantara adalah ajaran sesat dan menyesatkan, dan tidak berasal dari agama Islam sehingga wajib ditolak dan dilarang (voa-islam, 07/08/2018). Selain Habib Rizieq, tokoh-tokoh dari GNPf-Ulama juga banyak menolak. Sebut saja Felix Siauw. Bahkan ada deklarasi dari MUI Sumatera Barat secara tegas menolak Islam Nusantara. Meskipun belakangan dari pihak NU membantah bahwa penolakan banyak pihak tidak lepas dari kesalahan mereka memahami apa itu Islam Nusantara.

Terlepas dari berbagai tafsir terhadap Islam Nusantara yang berkembang liar di publik, penulis mendudukkan Islam Nusantara sebagai bentuk monopoli NU terhadap Islam di Nusantara. Sama halnya dengan GNPf-MUI melakukan rekayasa simbolik dalam aksi Bela Islam untuk memonopoli bahwa mereka adalah perwakilan Islam dan suara umat Islam.

Dari sini nampak perbedaan wacana yang digunakan NU dengan GNPf-Ulama. Jika GNPf-Ulama hanya menekankan aspek keagamaan dalam mendulang sentimen umat Islam, NU menggunakan aspek keagamaan dan nasionalisme. Dari segi *the elit* yang menjadi musuh dari "*the people*" pun berbeda. GNPf-Ulama lebih melihat *the elit* adalah penguasa politik hari ini, dalam kasus Bela Islam adalah Jokowi dan Ahok, sedangkan NU adalah kekuatan Islam global, seperti ISIS, HTI dan seterusnya, yang dianggap menjadi hantu mengerikan bagi keterpaduan Islam Nusantara yang eksis di Indonesia.

PERTARUNGAN YANG TERUS BERLANGSUNG

Dari dua contoh deskripsi yang telah penulis kemukakan, baik meninjau dari gerakan aksi Bela Islam dan Islam Nusantara, antara NU dan GNPf-Ulama akan terus melakukan kontestasi wacana berebut sebagai perwakilan populisme Islam di Indonesia. Ketika GNPf-Ulama (waktu itu masih GNPf-MUI) hendak melakukan mobilisasi massa umat Islam dalam aksi Bela Islam, nampak sekali bahwa NU secara struktural kontra terhadap aksi tersebut. Sebaliknya, ketika konsep Islam Nusantara yang diusung NU coba ditawarkan, kelompok dari GNPf-Ulama cenderung

menolak hal tersebut. Jika kita sepakati bahwa Islam Nusantara tidak lebih dari NU itu sendiri, maka ketika menolak Islam Nusantara berarti menolak NU itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, analisis ini dapat kita lanjutkan untuk menengok lebih jauh pertentangan yang terus-menerus berlangsung. Sebut saja Ijtima Ulama II yang diselenggarakan oleh GNPF-Ulama mendeklarasikan mendukung Prabowo-Sandi sekaligus menghimbau umat Islam di Indonesia untuk mendukung juga. Di sisi lain, beberapa tokoh NU seperti Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi Cawapres dari Jokowi menyatakan sebaliknya. Dia bahkan meragukan kapasitas ulama yang mendukung Prabowo-Sandi. Sebab, kata dia, para ulama-ulama pesantren mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Contoh lain semisal ketika Sandiaga Uno dikatakan sebagai santri pos-Islamisme, atau Jokowi, sebagaimana dikatakan Ma'ruf Amin sebagai santri dari Situbondo dan seterusnya dan sebagainya. Contoh pertarungan wacana Islam dan populisme Islam masih tetap berlangsung. Dalam menengok persoalan-persoalan tersebut, sudah tidak penting lagi meninjau aspek kebenaran berdasarkan dalil agama dan riwayat otoritas keagamaan, tapi lebih melihat wacana mana yang lebih kuat bertahan dan mempengaruhi banyak umat Islam sehingga dianggap sebagai kebenaran.

Alhasil, baik dari kubu GNPF-Ulama maupun NU masih tetap melakukan kontestasi untuk berusaha menjadi representasi dari Islam dan umat Islam dalam membangun wacana untuk melegitimasi diri sebagai populisme Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Salah satu topik sentral dalam kajian politik di Indonesia belakangan ini adalah kemunculan populisme Islam. Kajian-kajian yang menjadi arus utama dalam menelisik fenomena populisme Islam di Indonesia didominasi dengan hanya melihat GNPF-Ulama, atau bahkan spesifik FPI, sebagai aktor utama yang memegang peran penting. Padahal, di dalam internal Islam sendiri

ada satu kekuatan besar yang menjadi lawan dari GNPF-Ulama dalam upaya menjadikan dirinya dan gerakannya menjadi aspirasi Islam dan umat Islam dalam bentuk populisme Islam, yakni NU. Tulisan ini menawarkan untuk memberikan pembacaan terhadap fenomena populisme Islam di Indonesia dari perspektif pertentangan wacana atau diskursif dari dua kelompok tersebut.

Pertarungan wacana yang terjadi berusaha merebut makna dalam legitimasinya mewakili umat Islam (*the people*) sebagai basis utama populisme Islam. Perbedaan wacana yang dilakukan antara GNPF-Ulama dan NU terletak pada bentuk narasi yang berbeda, GNPF-Ulama hanya menekankan aspek Islam sedangkan NU menggunakan Islam dan nasionalisme sebagai wacana dominan.

Ulasan seputar perdebatan wacana terkait Bela Islam maupun Islam Nusantara menunjukkan bagaimana contoh dari perebutan klaim populisme Islam dari perspektif wacana. Pada masa yang akan datang, perebutan ini akan tetap berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, Ma'ruf, 2015, "Lampiran Khittah Islam Nusantara" dalam Akhmad Sahal & Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, PT Mizan Pustaka, Jakarta.
- Bayat, Asep, 2010, *Pos Islamisme*, LKiS, Yogyakarta.
- CNN Indonesia, 2016, "PBNU Larang Warga NU Demo Ahok", diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014130202-20-165486/pbnu-larang-warga-nu-demo-ahok> tanggal 10 November 2018 pukul 18.47 WIB.
- Fachrudin, Azis A, 2015, "Islam Nusantara dan Hal-hal yang Belum Selesai" dalam Akhmad Sahal & Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan.*, PT Mizan Pustaka, Jakarta.
- Fealy, Greg, & Robin Bush, 2014, "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and

- Nahdlatul Ulama", *Asian Journal of Social Science*, Vol. 42, No. 5 2014: 536-560.
- Hadiz, Vedi R. & Inaya Rakhmani, 2018, "Marketing morality in Indonesia's democracy", diakses di <http://asaa.asn.au/marketing-morality-indonesias-democracy/> tanggal 10 November 2018 pukul 14.00 WIB.
- Hadiz, Vedi R. & Robinson, 2017, "Competing populisms in post-authoritarian Indonesia" *International Political Science Review*, Vol. 38 No. 4 2017: 488-502.
- Hadiz, Vedi R., 2014, "A New Islamic Populism and the Contradictions of Development", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 44 No. 1 2014: 125-143.
- _____, 2016, *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Jager, Siegfried, 2001, "Discourse and Knowledge: theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis", dalam Ruth Wodak & Michael Meyer (ed.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, SAGE Publications, California, London & New Delhi.
- Jawa Pos, 2016, "Penjelasan Habib Rizieq soal Salat Jumat di Jalan", diakses di <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/11/2016/penjelasan-habib-rizieq-soal-salat-jumat-di-jalan> tanggal 10 November 2018 pukul 18.50 WIB.
- Jayanto, Dian Dwi, 2018, "Tafsir Islam Nusantara dan Dilema-dilema yang Turut Mengitarinya (Bagian 1-2)", diakses di <https://berpijar.co/tafsir-islam-nusantara-dan-dilema-dilema-yang-turut-mengitarinya-bagian-2-selesai/> 18 November 2018 pukul 21.45 WIB.
- Mils, Sara, 2001, *Discourse*, Routledge, London & New York.
- NU Online, 2016, "Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU" diakses di <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu> tanggal 10 November 2018 pukul 19.37 WIB.

- Pamungkas, Arie Setyaningrum dan Gita Octaviani, "Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: dari Representasi Daring ke Komunitas Luring" *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, 2017: 65-87.
- Savitri, Laksmi Adriani & Devi Adriyanti, "The Demise of Emancipatory Peasant Politics? Indonesia Fascism and The Rise of Islamic Populism" dalam *Conference Paper No. 69 International Institute of Social Studies (ISS)* di The Hague, Netherlands, 7-18 March 2018.
- Tempo.co, 2017, "Soal GNPF MUI dan Rizieq, Ini Penjelasan Ma`ruf Amin", diakses di <https://metro.tempo.co/read/841491/soal-gnpf-mui-dan-rizieq-ini-penjelasan-maruf-amin> tanggal 10 November 2018 pukul 18.30 WIB.
- Turmudi, Endang, 2004, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKiS, Yogyakarta.
- Voa Islam, 2018, "Ramai-ramai Menolak Islam Nusantara", diakses di <http://www.voa-islam.com/read/opini/2018/08/07/59518/ramairamai-menolak-islam-nusantara/#sthash.fnCQK24v.kE7nE4fm.dpbs> tanggal 10 November 2018 pukul 19.34 WIB.
- Wodak, Ruth, 2001, "What CDA is about- a summary of its history, important concept and its developments", dalam Ruth Wodak & Michael Meyer (ed.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, SAGE Publications, California, London & New Delhi.